

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai daerah tersebut.

Pembentukan Daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintah sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada didaerahnya.

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 dimana undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Drs. Darwin, MBP, 2010, p.5). Dengan otonomi ini, masing-masing tingkat pemerintahan dituntut untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara konsekuen dan harmonis. Fungsi dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama dalam memberikan pelayanan masyarakat (Drs. Darwin, MBP, 2010, p.9).

Selain itu, otonomi dikembangkan sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi nyata dibangun atas kehendak untuk menangani urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi daerah yang khas (Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, p.24).

Peranan Pendapatan Daerah merupakan faktor-faktor yang sangat penting karena menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Peranan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang utama disamping dana perimbangan yang diperoleh dari hasil eksploitasi sumberdaya alam akan sangat menentukan kekuatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Drs. Darwin, p.43).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang juga merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD).

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Berdasarkan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah, pembagian dana perimbangan daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya (Drs. Darwin, p.45).

PAD dan Dana Perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Penurunan kegiatan ekonomi diberbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD Daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan PDRB yang menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah. Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang mampu ditunjang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan PDRB serta peningkatan pertumbuhan penduduk disertai pemerataan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bekasi sebagai salah satu indikator perekonomian daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang tentu menggambarkan geliat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan yang juga meningkat dari waktu ke waktu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Bekasi meningkat sebesar 14,23% pada tahun 2010 dan 12,73% pada tahun 2011.

Dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh sektor sekunder dan tersier, maka ekonomi Kota Bekasi akan sangat bergantung pada kondusifitas iklim perekonomian nasional dan global, demikian juga dengan pertumbuhan ekonominya. Turun drastisnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi tahun 2009 hingga di titik 4,13% adalah implikasi dari faktor kondusifitas dimaksud. Namun demikian, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tiga tahun setelahnya yang mencapai rata-rata 6,4%.

Menurut Azhari Samudra (2005, p.44-45) menyatakan bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Lain-lain Penerimaan yang sah.

Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Perusahaan Daerah;
- d. Lain-lain usaha daerah yang sah.

Sumber keuangan yang berasal dari Dana Perimbangan, terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Menurut Azhari Samudra (2005, p.39-40) menyatakan bahwa, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Lingkungan;
9. Pajak Sarang Walet
10. Pajak Air Bawah Tanah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang signifikan.

2. Pembagian Dana Perimbangan Daerah akan dilaksanakan dengan melihat pada sumber pendapatannya yang diharapkan mampu meningkatkan PDRB. Dana Perimbangan Kota Bekasi sempat mengalami fluktuasi.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2009 sempat mengalami penurunan drastis yang diakibatkan dari perolehan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Kota Bekasi yang menurun.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang berkaitan tersebut, perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Dalam hal ini hanya akan dibahas mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan latar belakang masalah yang ada, dimana dalam masalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, memiliki prosedur dan sistem yang diterapkan dalam ketiga masalah tersebut.

Untuk itu, masalah utama yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini mencakup permasalahan mengenai pendapatan asli daerah, dana perimbangan, terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sehingga data tersebut dapat digunakan dalam analisis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten / Kota Bekasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan bahan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam hal pendapatan asli daerah dan dana perimbangan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk berbagai pihak yang memerlukan, khususnya yang berhubungan dengan masalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka sistem penulisannya akan dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas variabel penelitian dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi obyek penelitian, seluruh proses dan teknik analisis data hingga hasil dari pengujian seluruh hipotesis penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga menjelaskan apa saja keterbatasan dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat lebih mengembangkan dalam penelitian ini.